

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA**  
**PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Kemiskinan**

**2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks yang masih menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Menurut Todaro dan Smith dalam Di *et al.* (2024) kemiskinan terjadi karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dalam konteks perkotaan, kemiskinan sering kali bersifat struktural akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja serta kesenjangan akses pendidikan.

Sementara itu, Menurut artikel di Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia (2024) mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Definisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan diukur secara objektif berdasarkan standar ekonomi minimum, (Wulandari, 2023).

Menurut Rohyadi *et al.* (2024), kemiskinan juga memiliki dimensi sosial, yakni keterbatasan partisipasi seseorang dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya. Hal ini berarti bahwa kemiskinan bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga keterisolasian sosial yang memperlemah kemampuan individu untuk keluar dari siklus kemiskinan.

### 2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin (Yuspira *et al.*, 2023)

Menurut Mudrajad Kucoro (2006:125) dalam Syahputra & Rofizar (2023) penyebab kemiskinan berdasarkan sisi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, sehingga upah yang didapatkannya pun rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini juga diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, serta adanya diskriminasi atau keturunan.

Menurut Kuncoro (2020:45) dalam Kusumadewi *et al.* (2024) penyebab utama kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh sistem ekonomi dan sosial yang tidak adil, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan akses pendidikan, dan konsentrasi kepemilikan aset.

2. Kemiskinan kultural, yang berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat seperti rendahnya motivasi kerja, kurangnya inovasi, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Selain itu, Imtihani *et al.* (2024) menegaskan bahwa kemiskinan juga muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan akan sulit bersaing di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya memperbesar tingkat pengangguran dan kemiskinan.

### **2.1.1.3 Klasifikasi Kemiskinan**

Adapun menurut Susanto (2010) klasifikasi kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut selain dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatannya, untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan absolut apabila hasil pendaptan berada di bawah garis kemiskinan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibanding kelompok lain tanpa diperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak.

Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan relatif untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah. Kemiskinan relatif juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pengukuran relatif diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan sumber daya alam serta sumber daya manusia berupa kualitas pendidikan, kesehatan, serta perumahan.

### 3. Kemiskinan Subjektif

Setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin. Kemiskinan subjektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (*wants*) dengan kebutuhan (*needs*).

#### **2.1.1.4 Kriteria Kemiskinan**

Ada berbagai macam kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, salah satunya menurut Edi Suharto (2005:7) dalam Djumiarti (2010) adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Menurut Dewi (2023), seseorang dapat dikategorikan miskin apabila tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, tidak memiliki akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan tidak memiliki jaminan sosial maupun akses pekerjaan yang berkelanjutan,

Berdasarkan uraian teori kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan, bukanlah fenomena tunggal yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor demografis, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan kota di Indonesia, diperlukan pendekatan teoretis yang mampu mengaitkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran sebagai variabel penentu utama tingkat kemiskinan.

Teori Populasi Malthus yang dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus dalam Ko *et al.* (2025) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan penduduk melampaui kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja dan sumber daya, maka tekanan terhadap pasar tenaga kerja akan meningkat dan mendorong angka kemiskinan (konsep ini relevan dalam konteks urbanisasi dan beban demografis). Selanjutnya, *Human Capital Theory* oleh Gary S. Becker menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan pendapatan individu sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Teori ini konsisten dengan temuan empiris dari Jeri Faizal Adi Bahtia dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, sementara pengangguran juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2 Grand Theory**

#### **1. Teori Kemiskinan (*Poverty Theory*)**

Kemiskinan merupakan fenomena sosial ekonomi yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kekurangan pendapatan. Teori kemiskinan dalam ekonomi pembangunan memandang kemiskinan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kualitas sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, serta tekanan demografis. Todaro dan Smith dalam Hakobyan (2025), menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif. Dalam konteks perkotaan, kemiskinan

sering bersifat struktural karena adanya keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, pendidikan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Pendekatan kemiskinan modern juga menekankan bahwa kemiskinan merupakan keterbatasan kapabilitas individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan ekonomi. Sen (1999) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi kegagalan untuk mencapai fungsi kehidupan yang layak. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran dipandang sebagai determinan utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Teori kemiskinan menjadi landasan utama penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana faktor demografis dan ekonomi secara simultan membentuk kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia (Cahyani & Muljaningsih, 2022).

## 2. Teori Populasi Malthus (*Malthusian Population Theory*)

Hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan dijelaskan secara klasik melalui Teori Populasi Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung meningkat secara geometris, sedangkan kemampuan produksi dan sumber daya ekonomi tumbuh secara aritmetis. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan pangan, lapangan kerja, dan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, penambahan penduduk yang tidak terkendali akan memperbesar jumlah tenaga kerja melebihi daya serap ekonomi (Luthfi *et al.* 2019).

Dalam konteks modern, teori Malthus digunakan untuk menjelaskan fenomena tekanan demografis terhadap pasar tenaga kerja dan kesejahteraan, terutama di negara berkembang. Farasat *et al.*(2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kemiskinan karena sektor produktif tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk yang tinggi, baik akibat kelahiran maupun urbanisasi, memperbesar persaingan kerja dan menekan upah, sehingga meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan.

### 3. Teori Dualisme Ekonomi Lewis (*Lewis Dual Sector Model*)

Teori Dualisme Ekonomi yang dikemukakan oleh Arthur Lewis menjelaskan bahwa perekonomian negara berkembang terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan surplus tenaga kerja di sektor tradisional dan informal, khususnya di wilayah perkotaan. Apabila sektor modern tidak berkembang cukup cepat untuk menyerap kelebihan tenaga kerja tersebut, maka sebagian besar penduduk akan bertahan pada pekerjaan berproduktivitas rendah dengan pendapatan minim (Ranis, 2024).

Lewis menegaskan bahwa surplus tenaga kerja yang tidak terserap akan menciptakan pengangguran terselubung dan kemiskinan struktural. Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik kemiskinan perkotaan di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan. Penelitian empiris oleh Muchtar & Sihombing (2023) menunjukkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan penduduk kota dapat meningkatkan kemiskinan

apabila tidak disertai perluasan sektor formal. Dengan demikian, teori Lewis memperkuat hubungan antara jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan perkotaan.

#### 4. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary S. Becker memandang pendidikan sebagai bentuk investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga memperbesar peluang keluar dari kemiskinan. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menentukan tingkat kesejahteraan individu dan masyarakat (Roger *et al*, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Ghale *et al* (2025) menemukan bahwa pendidikan secara signifikan menurunkan kemiskinan perkotaan di Indonesia karena meningkatkan akses terhadap pekerjaan formal dan upah yang lebih layak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan keterampilan dan produktivitas, yang mendorong individu terjebak pada pekerjaan informal berpendapatan rendah dan meningkatkan risiko kemiskinan.

#### 5. Teori Pasar Tenaga Kerja dan Pengangguran

Teori pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa pengangguran merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Individu yang menganggur kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga meningkatkan kemungkinan jatuh ke dalam kemiskinan. Todaro dan Smith dalam

Ehlert, (2025) menegaskan bahwa pengangguran merupakan penyebab langsung kemiskinan, terutama di negara berkembang dengan sistem perlindungan sosial yang terbatas.

Dalam konteks perkotaan, pengangguran sering dipicu oleh ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) dan terbatasnya lapangan kerja formal. Penelitian Ramadhan & Ginting (2025) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di negara berkembang. Oleh karena itu, tingkat pengangguran dipandang sebagai faktor ekonomi yang secara langsung dan kuat memengaruhi kemiskinan perkotaan.

### **2.1.3 Jumlah Penduduk**

#### **2.1.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi karena berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga kerja, kebutuhan pendidikan, lapangan pekerjaan, serta tingkat kemiskinan, (Salsabila & Kustiawati, 2022).

Teori klasik mengenai pertumbuhan penduduk pertama kali dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1798) dalam Lutfi *et al.* (2019). dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population*, yang menyatakan bahwa penduduk tumbuh secara geometrik (1, 2, 4, 8, 16, ...) sedangkan produksi pangan meningkat secara aritmatik (1, 2, 3, 4, 5, ...). Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka akan terjadi *population trap* di mana peningkatan jumlah penduduk akan

menurunkan tingkat kesejahteraan karena sumber daya alam dan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi jumlah tenaga kerja yang meningkat.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk**

Menurut Purba *et al.* (2023) jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

#### **1. Faktor Kelahiran (*Fertilitas*)**

Tingginya angka kelahiran menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah penduduk. Di negara berkembang, tingkat kelahiran yang tinggi sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan dini, kurangnya kesadaran ber-KB, serta pengaruh nilai-nilai budaya yang memandang banyak anak sebagai simbol kesejahteraan.

#### **2. Faktor Kematian (*Mortalitas*)**

Penurunan angka kematian akibat perbaikan fasilitas kesehatan, gizi, dan sanitasi menyebabkan jumlah penduduk meningkat. BPS (2024) melaporkan bahwa angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat dari 70,7 tahun pada 2015 menjadi 72,3 tahun pada 2023, yang berarti lebih banyak penduduk hidup lebih lama dan memperbesar populasi.

#### **3. Migrasi**

Migrasi terutama dari desa ke kota menyebabkan pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat tajam. *UN-Habitat* (2023) mencatat bahwa urbanisasi di Indonesia telah mencapai 57,3% dan diproyeksikan meningkat hingga 70% pada 2040. Migrasi ini menimbulkan kepadatan penduduk di kota besar dan menambah beban terhadap penyediaan lapangan kerja dan perumahan.

#### 4. Faktor Ekonomi dan Sosial Budaya

Kondisi sosial ekonomi yang rendah sering kali mendorong masyarakat untuk memiliki anak lebih banyak sebagai bentuk jaminan sosial di masa tua. Selain itu, sistem nilai budaya tertentu masih memandang bahwa banyak anak identik dengan rezeki dan kekuatan keluarga.

#### 5. Kebijakan Pemerintah

Program *Keluarga Berencana (KB)*, pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta peraturan migrasi sangat mempengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk. Setelah program KB digalakkan secara masif sejak 1970-an, Indonesia berhasil menurunkan jumlah penduduk dari 2,6% menjadi 1,17% pada 2020 (BKKBN, 2023). Namun di kota-kota besar, pertumbuhan penduduk kembali meningkat akibat arus migrasi kerja.

#### **2.1.3.3 Dampak Jumlah Penduduk dan Pembangunan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan penduduk memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Menurut Khairunnisa *et al.* (2025), di satu sisi pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang potensial menjadi kekuatan produktif. Namun di sisi lain, apabila peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, maka justru akan menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Dampak pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Terhadap Ketenagakerjaan dan Pendapatan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah pasokan tenaga kerja, namun jika tidak disertai peningkatan permintaan tenaga kerja dari sektor produktif, maka

akan menimbulkan kelebihan tenaga kerja (*labor surplus*). Akibatnya, banyak penduduk bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.

## 2. Terhadap Kualitas Hidup dan Pendidikan

pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa peningkatan kapasitas pendidikan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak, sehingga tingkat pendidikan rata-rata stagnan. Rendahnya pendidikan berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan kota.

Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi pangan maupun pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, jumlah penduduk berkembang mengikuti deret ukur (*geometrik*), yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, sehingga terus bertambah secara berlipat ganda. Sementara itu, ketersediaan pangan dan kapasitas ekonomi hanya mampu meningkat mengikuti deret hitung (*aritmetik*), seperti 1, 2, 3, 4, 5, sehingga pertambahannya jauh lebih lambat. Ketidakseimbangan kedua pola pertumbuhan ini mengakibatkan tekanan ekonomi seperti meningkatnya kemiskinan, berkurangnya kesempatan kerja, serta penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan modern, konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menimbulkan beban pada pertumbuhan ekonomi, terutama ketika sumber daya produktif dan infrastruktur tidak mampu mengikuti kebutuhan populasi yang terus meningkat, (Rahman, 2018).

## **2.1.4 Pendidikan**

### **2.1.4.1 Pengertian Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Wirandi (2010:95) dalam Teguh & Sukari (2024) Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan merupakan pionir dalam membangun masa depan suatu bangsa jika pendidikan suatu bangsa sudah rendah, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama.

Sementara itu, Dhanda (2024) menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor fundamental dalam mengentaskan kemiskinan karena berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa, pendidikan yang rendah mendorong suatu kebodohan yang berakibat pada kemiskinan. Untuk memutuskan sebab akibat di atas ada satu kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan**

pendidikan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik. Menurut Tranggono *et al.* (2023), faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pendidikan antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor paling dominan. Keluarga berpenghasilan rendah sering kali kesulitan membiayai pendidikan anak karena keterbatasan dana. BPS (2023) mencatat bahwa sekitar 11,5% anak usia sekolah di Indonesia belum menyelesaikan pendidikan menengah karena kendala ekonomi.

b) Faktor Sosial Budaya

Nilai dan norma sosial turut memengaruhi pentingnya pendidikan di masyarakat. Di beberapa daerah, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, terutama bagi anak perempuan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang juga menghambat peningkatan kualitas SDM.

c) Faktor Geografis dan Aksesibilitas

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, jarak sekolah, dan transportasi menjadi hambatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan kesenjangan

pendidikan antara kota dan desa semakin melebar.

d) Faktor Kebijakan Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam bentuk program beasiswa, wajib belajar 12 tahun, dan pendidikan vokasi sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat. Kebijakan *Merdeka Belajar* yang diluncurkan pada 2020 juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja.

e) Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Revolusi industri 4.0 menuntut peningkatan keterampilan digital dan literasi teknologi. Akses terhadap teknologi pendidikan (*edutech*) menjadi kunci untuk pemerataan pendidikan di masa depan.

### **2.1.4.3 Jenis-jenis Pendidikan**

Adapun jenis pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah sekolah pada umumnya. Pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan dasar Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- b) Pendidikan Menengah Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah jurusan. Seperti SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- c) Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

## 2. Pendidikan Non formal

Pendidikan non formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar yaitu taman pendidikan al-quran (TPA) yang banyak di setiap mesjid. Selain itu, terdapat berbagai kursus di antaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

## 3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

### **2.1.5 Tingkat Pengangguran**

#### **2.1.5.1 Pengertian Pengangguran**

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. Menurut Azzahra *et al.* (2024) pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Secara makroekonomi, pengangguran menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada.

Menurut Sukirno (2004:28) dalam Andiadita *et al.* (2024) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja selama perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum 18 memperolehnya. Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pada 1 Oktober 1998, tenaga kerja di definisikan sebagai penduduk 15 tahun atau lebih. Perlu diketahui bahwa di Indonesia tidak menentukan batas usia maksimum tenaga kerja, hal ini dikarenakan Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional.

Dengan adanya pengangguran menyebabkan ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluarannya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara, (Didmanidze *et al.* 2023).

#### **2.1.5.2 Jenis-jenis Pengangguran**

Menurut Yanthiani (2023) pengangguran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

##### **1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)**

Terjadi karena adanya pergerakan tenaga kerja antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau perpindahan lokasi kerja. Biasanya bersifat sementara dan alami dalam dinamika pasar tenaga kerja.

## 2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*). Pengangguran jenis ini sering terjadi akibat perubahan teknologi dan transformasi ekonomi.

## 3. Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Muncul akibat fluktuasi kegiatan ekonomi. Pada saat resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan tenaga kerja menurun sehingga banyak tenaga kerja yang diberhentikan.

## 4. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Terjadi pada sektor-sektor tertentu yang sangat bergantung pada musim, seperti pertanian, pariwisata, dan konstruksi.

## 5. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Merupakan bentuk pengangguran di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Jenis ini sering kali paling berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan.

## 6. Setengah Menganggur (*Underemployment*)

Kondisi ketika seseorang bekerja di bawah kapasitas keterampilan atau jam kerja yang tidak penuh (kurang dari 35 jam per minggu). Menurut BPS (2023), sekitar 27,9 juta penduduk Indonesia tergolong setengah menganggur, yang sebagian besar berada di sektor informal.

Bentuk-bentuk pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai

akibatnya dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Setengah Menganggur Secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.
3. Tenaga Kerja yang Lemah Tenaga kerja yang lemah adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena gizi atau penyakit.
4. Tenaga Kerja yang Tidak Produktif Tenaga kerja yang tidak produktif adalah mereka yang bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

#### **2.1.5.3 Faktor-faktor Penyebab Pengangguran**

Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan, selain itu tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik. Pengangguran umumnya disebabkan karena angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga terjadi pengangguran.

Penyebab pengangguran menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999:657-668) dalam Kuznetsov (2023) pengangguran akan muncul dalam perekonomian disebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Proses mencari kerja Pada proses ini munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Hal ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain. Tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima.
2. Kelakuan upah Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya akan terjadi penurunan 22 besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kelakuan upah, dalam jangka pendek tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai indikasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kelakuan upah yang terjadi.
3. Efisiensi upah Besarnya upah juga dipengaruhi oleh efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin kesusahan para pekerja untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi maka akan terjadi

pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

#### **2.1.5.4 Cara Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia**

Menurut Paul A Samuelson dan William D. Nurdhaous (1993) dalam Amar *et al.* (2024) cara mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki Pasar Tenaga Kerja 24 Pengangguran sebagian ditimbulkan karena lowongan pekerjaan tidak tepat bertemu dengan penganggur. Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Permasalahan ini dapat di atasi dengan menyediakan sistem informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. Sistem ini dapat berupa pengumuman lowongan kerja di berbagai media dan tempat.
2. Menyediakan Program-Program Latihan Sering kali pekerja tidak memperoleh pelatihan yang cukup untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sering kali pekerja tidak memperoleh pelatihan yang cukup untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Banyak iklan lowongan pekerjaan yang mencari tenaga kerja dengan selalu menentukan keterampilan yang tidak dimiliki setiap tenaga kerja. Memberikan pelatihan kerja untuk pencari kerja, dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan dan keahlian tertentu, masalah tersebut amat

relevan di Negara kita, mengingat sebagian penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan dan keahlian tertentu.

3. Menciptakan Program Padat Karya Pemerintah hendaknya menciptakan proyek padat karya, dengan demikian akan menyerap pengangguran yang ada.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota di Indonesia.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian, Tahun & Nama	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil variabel yang sama	Nama Jurnal / Referensi Lengkap
1	<i>How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian's Poverty</i> (Hutabarat et al., 2023)	Jumlah penduduk	Tidak memasukkan variabel pendidikan dan pengangguran.	Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan	<i>International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities</i> , 2(1), 8–14. <a href="https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i1.92">https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i1.92</a>
2	<i>Effect of Population Growth and Income Inequality on Poverty: Indonesian Case Study in the Development Context</i> (Siburian et al., 2024)	Jumlah penduduk	Tidak memasukkan variabel pendidikan dan pengangguran.	Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan	<i>Outline Journal of Economic Studies</i> 3(2):89-100 DOI:10.61730/ojes.v3i2.216
3	<i>Population vs. Poverty Level in the Future in Indonesia: Holt's Linear Trend Method</i>	Jumlah penduduk	Tidak memasukkan variabel pendidikan dan pengangguran.	Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan	<i>International Journal of Sustainable Development and Planning</i> , Vol. 19, No. 7, pp. 2763-2770.

No	Judul Penelitian, Tahun & Nama	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil variabel yang sama	Nama Jurnal / Referensi Lengkap
	(Ariyanto & Nugraha, 2024)				<a href="https://doi.org/10.18280/ijstdp.190733">https://doi.org/10.18280/ijstdp.190733</a>
4	<i>The Role Of Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate On Poverty Level In Indonesia</i> (Langoday & Man, 2024)	Jumlah penduduk dan pendidikan	Tidak memasukkan variabel partisipasi angkatan kerja dan pengangguran.	Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan	<i>Journal of Law and Sustainable Development</i> , 12(2), e3011. <a href="https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3011">https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3011</a>
5	<i>How popularising higher education affects economic growth and poverty alleviation: empirical evidence from 38 countries</i> (Li et al., 2024)	Pendidikan, pengangguran, jumlah penduduk.	Perbedaan wilayah (38 negara)	Pendidikan berpengaruh positif signifikan, terhadap pengurangan kemiskinan.	<i>Humanit Soc Sci Commun</i> 11, 520 (2024). <a href="https://doi.org/10.1057/s41599-024-03013-5">https://doi.org/10.1057/s41599-024-03013-5</a>
6	Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2023 (Afrianto, 2025)	Pendidikan	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	<i>Akuntansi</i> , 4(1), 82–88. <a href="https://doi.org/10.55606/akuntansi.v4i1.2916">https://doi.org/10.55606/akuntansi.v4i1.2916</a>
7	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Purwanti et al., 2025)	Pendidikan, pengangguran.	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	<i>JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)</i> , 11(5), 3335-3344. <a href="https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4611">https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4611</a>
8	Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan	Pendidikan	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	<i>COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting</i> , 2(6), 228–238. <a href="https://doi.org/">https://doi.org/</a>

No	Judul Penelitian, Tahun & Nama	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil variabel yang sama	Nama Jurnal / Referensi Lengkap
	Provinsi Aceh (Sriyanti, et al., 2026)				10.31539/m0k4ah70
9	Analisis Pengaruh Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Baiquni & Feriyanto, 2025)	Pendidikan	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	<i>Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan</i> , 4(1), 1–10. <a href="https://doi.org/10.20885/JKE.K.vol4.iss1.art1">https://doi.org/10.20885/JKE.K.vol4.iss1.art1</a>
10	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Harilinawan et al., 2024)	Pendidikan	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	<i>Student Scientific Creativity Journal</i> , 2(4), 229–235. <a href="https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3763">https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3763</a>
11	Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Kediri (2015–2024) (Nurlailiyah et al., 2024)	Pengangguran	Perbedaan tempat penelitian	Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan	<i>EKSYPAR: E-Jurnal STAI Muhammadiyah Tulungagung</i> <a href="https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksypar/article/view/803">https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksypar/article/view/803</a>
12	Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Jawa Timur Periode 2020–2024 (Febrianti & Utami, 2025)	Pengangguran, kemiskinan	Upah minimum, tempat penelitian	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin	<i>Jurnal Edueco, Universitas Balikpapan</i> <a href="https://jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id/index.php/Edueco/article/view/366">https://jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id/index.php/Edueco/article/view/366</a>
13	Pengaruh Pertumbuhan	Pengangguran, kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi,	Tingkat pengangguran	<i>JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi</i>

No	Judul Penelitian, Tahun & Nama	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil variabel yang sama	Nama Jurnal / Referensi Lengkap
	Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan (Khairidah & Wardhana, 2025)		tempat penelitian	terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	<i>Dan Pembangunan</i> , 8(2), 377–385. <a href="https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.223">https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.223</a>
14	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2010–2023 (Wardiantin et al., 2024)	Pengangguran, kemiskinan	Tempat penelitian	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan	<i>World Bank Open Knowledge Repository</i> , 2012, pp. 55–84.
15	<i>Does Unemployment Moderate the Effect of Government Expenditure on Poverty? A Cross-Provinces Data Evidence from Indonesia</i> (Amri et al., 2024)	Pengangguran, kemiskinan	Tempat penelitian	Tingkat pengangguran secara substansial meningkatkan tingkat kemiskinan	<i>Economic Studies</i> , (2), 92–113. <a href="https://ideas.repec.org/a/bas/econst/y2024i2p92-113.html">https://ideas.repec.org/a/bas/econst/y2024i2p92-113.html</a>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Landasan Umum

Kerangka pemikiran merupakan rancangan berpikir logis yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara sistematis berdasarkan teori ekonomi

pembangunan dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan di kota-kota Indonesia dipengaruhi oleh faktor demografis (jumlah penduduk), faktor sumber daya manusia (pendidikan), dan faktor ekonomi makro (pengangguran).

### **2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan**

Jumlah penduduk memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan suatu wilayah. Secara teoritis, hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui Teori Populasi Malthus yang dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus. Malthus menekankan bahwa ketika jumlah penduduk terus bertambah, sementara ketersediaan sumber daya dan kesempatan ekonomi berkembang lebih lambat, maka akan muncul ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan. Ketidakseimbangan ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. Konsep tersebut juga dituliskan kembali dalam konteks ekonomi modern oleh Syahnaz Salsabila & Kustiawati (2022) yang menyatakan bahwa besarnya jumlah penduduk, jika tidak terkendali dan tidak disertai peningkatan kapasitas ekonomi, dapat memicu ketimpangan antara kebutuhan dan sumber daya yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tingginya jumlah penduduk dapat meningkatkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar. Kondisi ini mendorong persaingan kerja semakin ketat dan menekan pendapatan riil masyarakat, terutama di wilayah

perkotaan yang umumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus tujuan utama migrasi penduduk.

Hasil penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hutabarat *et al.* (2023) menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Dalam konteks wilayah perkotaan Indonesia, besarnya jumlah penduduk cenderung memperbesar kemiskinan karena kapasitas lapangan kerja formal dan daya serap ekonomi perkotaan sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk (melalui kebijakan kependudukan yang efektif) serta peningkatan kualitas penduduk menjadi faktor penting dalam upaya penurunan kemiskinan.

### **2.2.3 Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena pendidikan berperan sebagai investasi dalam modal manusia (*Human Capital Theory*), yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar. Hubungan ini didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan negatif signifikan dengan kemiskinan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinan yang dialami, (Dhanda, 2024).

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, pendidikan berperan sebagai sarana mobilitas sosial dan alat peningkatan kualitas tenaga kerja. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan formal, upah yang lebih tinggi, serta stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Afrianto (2025), Purwanti *et al.* (2025), serta Sriyanti *et al.* (2026) menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan secara signifikan mampu menurunkan kemiskinan. Harilinawan *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling efektif dalam pengurangan kemiskinan di negara berkembang.

Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan dapat menjadi lemah atau tidak signifikan apabila kualitas pendidikan rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas pendidikan tanpa diikuti peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan belum tentu efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Pendidikan tetap menjadi variabel fundamental dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan. Pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **2.2.4 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan**

Pengangguran memiliki hubungan langsung dan kuat dengan kemiskinan. Secara teoritis, hubungan ini dijelaskan melalui teori pasar tenaga kerja yang menyatakan bahwa individu yang tidak bekerja kehilangan sumber pendapatan utama sehingga meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar proporsi penduduk yang tidak memiliki pendapatan tetap. Hubungan ini dibuktikan secara empiris oleh (Nurlailiyah *et al.* 2024).

Dalam konteks ekonomi perkotaan, pengangguran sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, pertumbuhan sektor informal, serta terbatasnya lapangan kerja formal. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

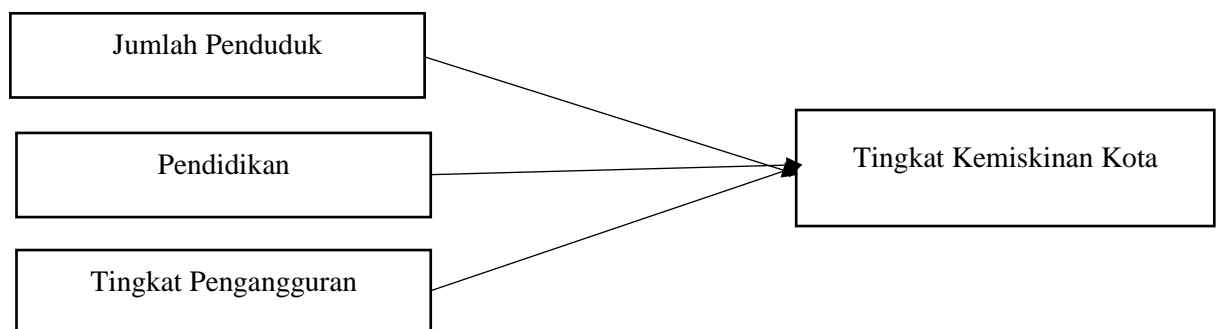
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Febrianti & Utami (2025), Khairidah & Wardhana (2025), serta Wardiantin *et al* (2024) membuktikan bahwa peningkatan pengangguran secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan. Amri *et al* (2024) juga menemukan bahwa pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kemiskinan meskipun terdapat intervensi kebijakan pemerintah.

Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia masih menjadi faktor dominan peningkat kemiskinan, terutama akibat keterbatasan lapangan kerja formal dan tingginya persaingan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat penting dalam menekan kemiskinan perkotaan.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih perlu dibuktikan melalui analisis data empiris. Berdasarkan teori ekonomi pembangunan, teori modal manusia, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Di duga jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif sedangkan pendidikan berpengaruh negatif secara parsial terhadap kemiskinan perkotaan di 34 provinsi indonesia.
2. Di duga jumlah penduduk, pendidikan, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan di 34 provinsi indonesia.